



► PENATAAN KAWASAN

Tanah untuk Fasum Terus Diupayakan

UMBULHARJO-
Pemerintah Kota
(Pemkot) Jogja
terus mengupayakan
pengadaan lahan
untuk fasilitas umum
(fasum) di tengah
keterbatasan ruang dan
tingginya harga tanah
di wilayah perkotaan.

Stefani Yulindriani
stefani@harianjogja.com

Pengadaan lahan diprioritaskan untuk pembangunan balai warga, balai RW, hingga Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di kampung-kampung yang masih minim fasilitas bersama.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kota Jogja, Wahyu Handoyo, mengatakan kebutuhan lahan di Kota Jogja semakin mendesak karena ketersediaannya terbatas, sementara ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat belum merata.

"Fasilitas umum di kelurahan itu untuk balai warga, RW, RK dan sebagainya, sehingga benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Tahun ini baru bisa satu titik dengan anggaran sekitar Rp1,2 miliar," ujarnya, Minggu (10/5).

► Saat ini, keberadaan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat belum merata.

► Masih ada 161 usulan pengadaan fasum yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.

Wahyu menjelaskan Pemkot Jogja memprioritaskan pengadaan lahan di wilayah kampung atau kelurahan yang belum memiliki RTHP maupun balai RW. Jika masih ada lahan milik warga yang dinilai potensial untuk kepentingan umum, masyarakat dapat mengajukan kepada Pemkot agar dilakukan pembelian.

"Ketika warga belum mempunyai RTHP dan balai RW, lalu ada lahan yang potensial dimanfaatkan ke depan, itu bisa diajukan. Setelah dibeli Pemkot, nantinya dimanfaatkan untuk balai warga atau balai kampung yang manfaatnya kembali ke masyarakat," katanya.

Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Wahyu menyebut masih terdapat sekitar 161 usulan warga yang belum dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan APBD Kota Jogja.

Menurutnya, pengadaan tanah untuk fasilitas umum rata-rata hanya berkisar Rp1 miliar hingga

Rp3 miliar per tahun. Dengan nilai tersebut, Pemkot umumnya hanya mampu merealisasikan satu hingga dua titik pengadaan lahan setiap tahunnya. "Nilai tanah di Kota Jogja cukup tinggi, sementara anggaran APBD kita terbatas sehingga tidak bisa banyak," katanya.

Menurut Wahyu, harga lahan tidak dapat disamaratakan karena penentuan nilainya dilakukan melalui *appraisal* oleh lembaga independen. Penilaian dipengaruhi berbagai faktor seperti lokasi, akses, hingga harga pasaran di kawasan sekitar.

Ke depan, Pemkot berharap pengadaan lahan tidak hanya mendukung kebutuhan balai warga, tetapi juga memperkuat pemenuhan target ruang terbuka hijau di perkotaan. "Harapan kami prioritas pemenuhan RTHP bisa terus berjalan menuju target 30 persen ruang terbuka hijau. Kebutuhan balai RT, RW, kelurahan untuk masyarakat juga sama-sama menjadi kebutuhan," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005